

BAB IV

ANALISIS ISI: UNDANG-UNDANG DAN REGULASI TENTANG NARKOBA TERKAIT DENGAN KEBIJAKAN *WAR ON DRUGS*

Bab ini akan menjabarkan informasi tentang pendekatan yang ada dalam undang-undang dan regulasi tentang narkoba di Filipina. Penjabaran informasi ditampilkan dalam bentuk tabel frekuensi berdasarkan kuantifikasi lembar *coding* yang merujuk pada beberapa elemen keamanan dari analisis isi dokumen produk regulasi tentang narkoba di Filipina, kemudian data tersebut di interpretasi dengan deskripsi. Dokumen yang akan digunakan sebagai objek analisis isi berjumlah 7 dokumen (periode 2002-2017) yang diperoleh penulis. Uraian analisis isi pada bab ini akan menjawab rumusan masalah pada bab I.

Dalam undang-undang, narkoba didefinisikan sebagai zat yang tercantum dalam daftar pada Konvensi Tunggal tahun 1961 tentang Narkotika, sebagaimana telah di amandemen oleh Protokol 1972, dan dalam daftar yang tercantum pada Konvensi Tunggal 1971 tentang Zat Psicotropika. Zat tersebut dapat berupa alami maupun sintetis. Di Filipina, narkoba juga dianggap sebagai ancaman baik berupa penyakit sosial maupun merusak generasi muda. Maka dari itu penulis berusaha untuk menganalisa terhadap produk regulasi tentang narkoba di Filipina.

Dokumen yang akan digunakan sebagai objek analisis terdiri dari berbagai level regulasi, seperti regulasi dalam level *Republic Act* atau UU adalah: R.A. No. 9165 atau yang dikenal sebagai *Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002* dan R.A. No. 10640. Sedangkan regulasi dalam level keputusan presiden adalah: *Executive Order* No. 218 *Series of 2003* dan *Executive Order* No. 15 *Series of 2017*. Kemudian regulasi dalam level institusi adalah: *Command Memorandum Circular* No. 16 *Series of 2016*, *Dangerous Drugs Board Regulation* No. 2

Series 2007, dan *Dangerous Drugs Board Regulation No. 1 Series 2016*.

Terdapat lima indikator yang digunakan dalam menganalisa pendekatan yang digunakan dalam 7 dokumen produk regulasi yang mengatur tentang narkoba di Filipina, yaitu aktor, otoritas, sumber anggaran, tata kelola, dan output. Dari kelima indikator tersebut berisikan sejumlah kata, frasa, dan kalimat yang kemudian diklasifikasikan ke dalam dua kelompok pendekatan, realisme dan liberalisme.

A. Analisa Terhadap Indikator Aktor

Dalam indikator ini, aktor didefinisikan sebagai subjek yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan atau terlaksananya dokumen produk regulasi tentang narkoba di Filipina. Subjek tersebut dapat berupa perseorangan, kelompok, maupun lembaga pemerintahan. Indikator aktor ini diwakili dalam penggunaan sejumlah kata seperti negara, lembaga formal pemerintah, polisi, militer, kejaksaan, badan intelijen, dan negara asing pada pendekatan realisme. Kemudian terdapat kata individu, korporasi, kelompok, dan perusahaan pada pendekatan liberalisme.

Hasil analisa pada *Tabel 4.1* di bawah ini menunjukkan bahwa mayoritas persentase aktor-aktor realisme pada 7 dokumen produk regulasi tentang narkoba di Filipina lebih tinggi dibandingkan dengan aktor-aktor liberalisme. Persentase aktor-aktor realisme pada RA. 9165 sebesar 39.3%, RA. 10640 sebesar 66.7%, EO. No. 15 tahun 2017 sebesar 81.8%, EO No. 218 tahun 2003 sebesar 80%, CMC No. 16 tahun 2016 sebesar 72.8%, DDB Reg. No. 2 tahun 2007 sebesar 96.3%, dan DDB Reg. No. 1 tahun 2016 sebesar 81.5%, dengan total persentase kumulatif sebesar 56.8%.

Sedangkan persentase aktor-aktor liberalisme pada RA. 9165 sebesar 60.7%, RA. 10640 sebesar 33.3%, EO. No. 15 tahun 2017 sebesar 18.2%, EO No. 218 tahun 2003 sebesar 20%, CMC No. 16 tahun 2016 sebesar 27.2%, DDB Reg. No. 2 tahun 2007 sebesar 3.7%, dan DDB Reg. No. 1 tahun 2016

sebesar 18.5%, dengan total persentase kumulatif sebesar 43.2%.

		12.	<i>Foreign Government</i>	9	0	1	0	0	0	0	10
TOTAL				99	2	18	4	59	26	44	252
PERSENTASE				39,3%	66,7%	81,8%	80%	72,8%	96,3%	81,5%	56,8%
Liberalisme	L1.1	1.	<i>Person</i>	104	1	0	0	5	0	4	114
		2.	<i>Individual</i>	7	0	1	0	0	0	0	8
	L1.2	3.	<i>Corporation</i>	7	0	0	0	0	0	2	9
	L1.3	4.	<i>Group</i>	9	0	0	0	7	0	3	19
		5.	<i>Organization</i>	18	0	2	0	4	0	0	24
	L1.4	6.	<i>Syndicate</i>	3	0	1	1	6	1	1	13
		7.	<i>Company</i>	5	0	0	0	0	0	0	5
TOTAL				153	1	4	1	22	1	10	192
PERSENTASE				60,7%	33,3%	18,2%	20%	27,2%	3,7%	18,5%	43,2%

Tabel 4. 1 Hasil Pengukuran Indikator Aktor

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Tingginya penggunaan kata dan frasa individu dalam produk regulasi tersebut menunjukkan bahwa aktor-aktor non negara memiliki keterkaitan yang lebih besar dibandingkan dengan aktor-aktor lainnya dalam hal narkoba. Banyaknya penggunaan kata "*person*" menunjukkan bahwa produk regulasi tentang narkoba di Filipina cenderung lebih mengedepankan aktor-aktor non negara sebagai objek hukum dalam produk regulasi mereka. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perorangan, kelompok, dan sindikat yang mengedarkan narkoba sehingga peredaran narkoba di Filipina dapat berkembang dengan pesat.

Data yang diperoleh dalam indikator aktor tersebut menunjukkan bahwa kata "*government*" menempati urutan kedua sebagai penggunaan kata terbanyak dalam indikator aktor. Hal tersebut cukup unik karena pemerintah sebagai aktor negara seharusnya menempati urutan pertama dalam penggunaan kata terbanyak dalam indikator tersebut, karena dalam mengatasi masalah narkoba cenderung harus melibatkan pemerintahan agar kepentingan dan kedaulatan negara dapat terlindungi.

Namun disisi lain, secara garis besar penggunaan kata aktor-aktor realisme pada 7 dokumen produk regulasi tentang narkoba cenderung lebih tinggi dibandingkan penggunaan kata aktor-aktor liberalisme. Kecenderungan ini seolah-olah mengatakan bahwa aktor-aktor negara seperti aktor pemerintah, polisi, dan lembaga penegak hukum memiliki peran yang lebih banyak dibandingkan dengan aktor-aktor lainnya dalam mengatasi masalah narkoba.

Disamping itu, walaupun masalah narkoba di Filipina dianggap sebagai ancaman negara, namun masalah narkoba lebih mengarah di Filipina lebih mengarah pada isu keamanan dibandingkan dengan isu strategis atau pertahanan negara. Hal itu dibuktikan dengan lebih tingginya jumlah penggunaan kata ataupun frasa polisi dibandingkan dengan militer.

Banyaknya penggunaan kata “*person*” dan “*government*” yang berasal dari dua pendekatan yang berbeda mencitrakan bahwa produk regulasi tentang narkoba di Filipina tidak hanya menggunakan satu pendekatan saja dalam mengatasi isu narkoba, namun produk regulasi tersebut dapat mengkolaborasikan kedua aktor pendekatan antara aktor-aktor pendekatan realisme, yang berarti segala sesuatunya merupakan tugas negara serta keamanan merupakan prioritas utama dan aktor-aktor liberalisme, yang berarti kebebasan, hak, dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama. Kolaborasi dari kedua pendekatan tersebut kemudian telah menjadi pedoman pemerintah dalam mengatasi masalah narkoba di Filipina, dengan bertujuan untuk menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara serta melindungi kesejahteraan masyarakat Filipina dari dampak narkoba yang berbahaya, seperti yang telah tertulis dalam *Section 2 Republic Act 9165*, yaitu:¹

“It is the policy of the State to safeguard the integrity of its territory and the well-being of its citizenry particularly the youth, from the harmful effects of dangerous drugs on their physical and mental well-being, and to defend the same against acts or omissions detrimental to their development and preservation. In view of the foregoing, the State needs to enhance further the efficacy of the law against dangerous drugs, it being one of today's more serious social ills.”

B. Analisa Terhadap Indikator Otoritas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otoritas merupakan kekuasaan atau wewenang yang sah yang diberikan pada suatu lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya.²

¹ *Republic Act No. 9165*

² KBBI, “otoritas”, diakses dari <https://kbbi.web.id/otoritas>, pada tanggal 31 Januari 2019

Namun dalam konteks indikator ini, otoritas didefinisikan sebagai wewenang atau hak melakukan tindakan pada suatu lembaga negara dalam merespons masalah narkoba yang terjadi di Filipina. Indikator otoritas ini diwakili dalam penggunaan sejumlah kata seperti, penangkapan, penahanan, investigasi, pengawasan, hukuman, dan penindakan pada pendekatan realisme. Kemudian terdapat penggunaan kata seperti, rehabilitasi, kerjasama, pertimbangan, pembebasan, dan hadiah pada pendekatan liberalisme.

Hasil analisa pada *Tabel 4.2* di bawah ini menunjukkan bahwa mayoritas persentase otoritas pendekatan realisme pada 7 dokumen produk regulasi tentang narkoba di Filipina lebih tinggi dibandingkan dengan persentase otoritas pendekatan liberalisme. Persentase otoritas pendekatan realisme pada RA. 9165 sebesar 68.5%, RA. 10640 sebesar 66.7%, EO. No. 15 tahun 2017 sebesar 75%, EO No. 218 tahun 2003 sebesar 0%, CMC No. 16 tahun 2016 sebesar 80.8%, DDB Reg. No. 2 tahun 2007 sebesar 16.7%, dan DDB Reg. No. 1 tahun 2016 sebesar 14.6%, dengan total persentase kumulatif sebesar 51.9%.

Sedangkan persentase otoritas pendekatan liberalisme pada RA. 9165 sebesar 31.5%, RA. 10640 sebesar 33.3%, EO. No. 15 tahun 2017 sebesar 25%, EO No. 218 tahun 2003 sebesar 0%, CMC No. 16 tahun 2016 sebesar 19.2%, DDB Reg. No. 2 tahun 2007 sebesar 83.3%, dan DDB Reg. No. 1 tahun 2016 sebesar 85.4%, dengan total persentase kumulatif sebesar 48.1%.

Pendekatan	Kode	No.	Otoritas	Dokumen Undang-Undang dan Regulasi							
				R.A 9165	R.A 10640	E.O. No. 15 2017	E.O. No. 218 2003	CMC No. 16 2016	DDB Reg. No.2 2007	DDB Reg. No. 1 2016	Total Kata
Realisme	R2.1	1.	<i>Arrest</i>	8	0	2	0	7	1	14	32
	R2.2	2.	<i>Detention</i>	7	0	2	0	0	0	2	11
		3.	<i>Detain</i>	1	0	0	0	1	0	0	2
	R2.3	4.	<i>Investigation</i>	11	0	2	0	9	0	4	26
	R2.4	5.	<i>Surveillance</i>	4	0	0	0	0	0	1	5
	R2.5	6.	<i>Penalty</i>	61	0	0	0	0	0	0	61
		7.	<i>Imprisonment</i>	40	0	0	0	0	0	0	40
		8.	<i>Custody</i>	9	3	0	0	1	0	1	14
		9.	<i>Fine</i>	42	0	0	0	0	0	0	42
	R2.6	10.	<i>Punishment</i>	9	0	1	0	0	0	0	10
	R2.6	11.	<i>Prosecution</i>	23	0	2	0	3	0	2	30
TOTAL				215	3	9	0	21	1	24	273
PERSENTASE				68,5%	66,7%	75%	0%	80,8%	16,7%	14,6%	51,9%
Liberalisme	L2.1	1.	<i>Rehabilitation</i>	37	0	1	0	4	3	0	45
		2.	<i>Treatment</i>	30	0	1	0	0	1	0	32

	L2.2	3.	<i>Cooperation</i>	6	0	0	0	0	0	2	8	
		4.	<i>Bargain</i>	2	0	0	0	0	0	0	0	2
	L2.3	5.	<i>Consideration</i>	6	0	0	0	0	1	2	9	
		6.	<i>Consolidation</i>	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	L2.4	7.	<i>Exemption</i>	2	0	0	0	0	0	0	0	2
		8.	<i>Release</i>	8	0	1	0	0	0	0	1	10
	L2.5	9.	<i>Reward</i>	1	0	0	0	0	0	0	88	89
		10.	<i>Compensation</i>	5	0	0	0	0	0	0	0	5
		11.	<i>Award</i>	1	0	0	0	1	0	0	47	49
	TOTAL				99	1	3	0	5	5	140	253
	PERSENTASE				31,5%	33,3%	25%	0%	19,2%	83,3%	85,4%	48,1%

Tabel 4. 2 Hasil Pengukuran Indikator Otoritas

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Banyaknya penggunaan kata “*reward*” menunjukkan bahwa produk regulasi tentang narkoba di Filipina cenderung lebih mengedepankan timbal balik atau hadiah jika seseorang telah memberikan informasi yang dibutuhkan kepada lembaga yang berwenang dalam mengatasi narkoba. Hadiah yang dimaksud dapat berupa materi, jika orang tersebut merupakan rakyat biasa, kemudian dapat berupa kompensasi, jika orang tersebut merupakan pengguna narkoba yang telah ditangkap dalam operasi narkoba, dan penghargaan, jika orang tersebut merupakan salah satu dari aparat yang berwenang.

Data yang diperoleh dalam indikator otoritas tersebut menunjukkan bahwa kata “*penalty*” menempati urutan kedua sebagai penggunaan kata terbanyak dalam indikator otoritas. Pola yang sama terulang kembali seperti pada indikator aktor, dimana “*penalty*” merupakan salah satu cara yang dikampanyekan oleh Presiden Duterte dalam mengatasi masalah narkoba di Filipina, baik itu hukuman mati, seumur hidup, maupun hukuman dalam waktu tertentu.

Namun jika kita amati lagi, banyaknya penggunaan kata “*reward*”, “*penalty*”, yang kemudian disusul dengan kata “*fine*”, “*imprisonment*”, “*rehabilitation*”, dan “*treatment*”, seolah-olah mencitrakan kembali adanya kolaborasi dua pendekatan antara pendekatan realisme dan liberalisme. Dari hal ini seolah-olah produk regulasi tentang narkoba di Filipina ingin memberitahukan kepada kita bahwa para pengguna dan pecandu narkoba tersebut dapat dipandang melalui dua kacamata yang berbeda, yaitu sebagai kriminal atau sebagai pasien. Jika kita memandang mereka sebagai kriminal, maka solusi yang tepat adalah menjatuhkan mereka hukuman pidana seperti yang telah tertulis dalam undang-undang. Namun jika kita memandang mereka sebagai pasien, maka solusi yang tepat adalah memberikan mereka pengobatan.

C. Analisa Terhadap Indikator Sumber Anggaran

Dalam indikator ini, sumber anggaran didefinisikan sebagai sumber dana dari suatu institusi atau lembaga yang

kemudian disusun dalam suatu rencana yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk menjalankan produk regulasi tentang narkoba di Filipina. Indikator sumber anggaran ini merupakan indikator yang memiliki jumlah *sign words* paling sedikit, diantaranya seperti pemerintah, lembaga, anggaran negara, dan subsidi pada pendekatan realisme. Kemudian terdapat *sign words* pinjaman dan donasi pada pendekatan liberalisme.

Hasil analisa pada **Tabel 4.3** di bawah ini menunjukkan bahwa pendekatan realisme lebih mendominasi pada produk regulasi ini. Persentase sumber anggaran pendekatan realisme pada RA. 9165 sebesar 50%, RA. 10640 sebesar 0%, EO. No. 15 tahun 2017 sebesar 0%, EO No. 218 tahun 2003 sebesar 100%, CMC No. 16 tahun 2016 sebesar 0%, DDB Reg. No. 2 tahun 2007 sebesar 100%, dan DDB Reg. No. 1 tahun 2016 sebesar 0%, dengan total persentase kumulatif sebesar 60%. Sedangkan persentase sumber anggaran pendekatan liberalisme pada RA. 9165 sebesar 50%, RA. 10640 sebesar 0%, EO. No. 15 tahun 2017 sebesar 0%, EO No. 218 tahun 2003 sebesar 0%, CMC No. 16 tahun 2016 sebesar 0%, DDB Reg. No. 2 tahun 2007 sebesar 0%, dan DDB Reg. No. 1 tahun 2016 sebesar 0%, dengan total persentase kumulatif sebesar 40%.

Tabel 4. 3 Hasil Pengukuran Indikator Sumber Anggaran

Pendekatan	Kode	No.	Sumber Anggaran	Dokumen Undang-Undang dan Regulasi							Total Kata
				R.A 9165	R.A 10640	E.O. No. 15 2017	E.O. No. 218 2003	CMC No. 16 2016	DDB Reg. No.2 2007	DDB Reg. No. 1 2016	
Realisme	R3.1	1.	<i>Government*</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	R3.2	2.	<i>Institution</i>	1	0	0	1	0	0	0	2
	R3.3	3.	<i>State Budget</i>	1	0	0	0	0	1	0	2
	R3.4	4.	<i>Subsidy</i>	2	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL				4	0	0	1	0	1	0	6
PERSENTASE				50%	0%	0%	100%	0%	100%	0%	60%
Liberalisme	L3.1	1.	<i>Debt</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	L3.2	2.	<i>Donation</i>	4	0	0	0	0	0	0	4
TOTAL				4	0	0	0	0	0	0	4
PERSENTASE				50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

**sign words* yang diteliti hanya *sign words* yang memiliki keterkaitan dengan sumber anggaran

Tingginya penggunaan kata dan frasa donasi dalam produk regulasi tersebut menunjukkan bahwa dana yang digunakan dalam mengatasi masalah narkoba di Filipina tidak hanya berasal dari institusi atau anggaran pemerintah saja, namun juga berasal dari donasi-donasi. Data yang diperoleh dalam indikator sumber anggaran tersebut juga menunjukkan subsidi, anggaran negara, dan institusi juga berkontribusi sebagai sumber anggaran dalam menjalankan produk regulasi tentang narkoba di Filipina.

Sesuai yang diatur dalam *Article X Section 87 R.A No. 9165*, dimana *Philippine Charity Sweepstakes Office (PSCO)* tiap tahunnya menyumbangkan sebesar 12 juta peso sebagai dana umum pelaksanaan undang-undang dan setidaknya 50% dari dana tersebut akan dicadangkan untuk bantuan pusat rehabilitasi milik pemerintah atau pribadi. Selanjutnya *Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR)* akan memberikan sebagian dana yang dihasilkan sebesar 5 juta peso tiap bulannya yang kemudian akan disisihkan untuk membangun pusat rehabilitasi narkoba yang memadai di Filipina serta untuk biaya pemeliharaan dan pengoperasian pusat rehabilitasi tersebut. Temuan tersebut membuktikan lagi adanya keseimbangan antara pendekatan liberalisme dan realisme pada produk regulasi tentang narkoba di Filipina.

“All receipts derived from fines, fees and other income authorized and imposed in this Act, including ten percent (10%) of all unclaimed and forfeited sweepstakes and lotto prizes but not less than twelve million pesos (P12,000,000.00) per year from the Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO), are hereby constituted as a special account in the general fund for the implementation of this Act: Provided , That no amount shall be disbursed to cover the operating expenses of the Board and other concerned agencies: Provided, further , That at least fifty percent (50%) of all the funds shall be

reserved for assistance to government-owned and/or operated rehabilitation centers.”³

“A portion of the funds generated by the Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) in the amount of Five million pesos (P5,000,000.00) a month shall be set aside for the purpose of establishing adequate drug rehabilitation centers in the country and also for the maintenance and operations of such centers.”⁴

D. Analisa Terhadap Indikator Tata Kelola

Dalam indikator ini, tata kelola didefinisikan sebagai serangkaian proses, kebiasaan, atau aturan yang mempengaruhi cara bagaimana produk regulasi tentang narkoba di Filipina akan diarahkan, dipantau, dan dikendalikan. Indikator tata kelola ini merupakan indikator kedua yang memiliki jumlah *sign words* paling sedikit, dimana dalam indikator ini diwakili dalam penggunaan sejumlah kata seperti operasi, kekuatan, regulasi, dan ancaman pada pendekatan realisme. Kemudian terdapat penggunaan kata seperti informasi, hak warga, dan kebebasan pada pendekatan liberalisme.

Hasil analisa pada **Tabel 4.4** di bawah ini menunjukkan bahwa mayoritas persentase tata kelola pendekatan realisme pada 7 dokumen produk regulasi tentang narkoba di Filipina lebih tinggi dibandingkan dengan tata kelola pendekatan liberalisme. Persentase tata kelola realisme pada RA. 9165 sebesar 60.5%, RA. 10640 sebesar 100%, EO. No. 15 tahun 2017 sebesar 90%, EO No. 218 tahun 2003 sebesar 100%, CMC No. 16 tahun 2016 sebesar 78.1%, DDB Reg. No. 2 tahun 2007 sebesar 93.3%, dan DDB Reg. No. 1 tahun 2016 sebesar 95.5%, dengan total persentase kumulatif sebesar 83.3%.

³ Loc.Cit., *Republic Act* No. 9165

⁴ *Ibid.*

Sedangkan tata kelola liberalisme pada RA. 9165 sebesar 39.5%, RA. 10640 sebesar 0%, EO. No. 15 tahun 2017 sebesar 10%, CMC No. 16 tahun 2016 sebesar 21.9%, DDB Reg. No. 2 tahun 2007 sebesar 6.7%, dan DDB Reg. No. 1 tahun 2016 sebesar 4.5%, dengan total persentase kumulatif sebesar 16.2%.

Tabel 4. 4 Hasil Pengukuran Indikator Tata Kelola

Pendekatan	Kode	No.	Tata Kelola	Dokumen Undang-Undang dan Regulasi							
				R.A 9165	R.A 10640	E.O. No. 15 2017	E.O. No. 218 2003	CMC No. 16 2016	DDB Reg. No.2 2007	DDB Reg. No. 1 2016	Total Kata
Realisme	R4.1	1.	<i>Operation</i>	15	0	7	6	72	38	133	271
	R4.2	2.	<i>Power</i>	9	0	1	1	0	2	5	18
	R4.3	3.	<i>Regulation</i>	25	1	0	0	3	2	10	41
	R4.4	4.	<i>Threat</i>	0	0	1	0	0	0	0	1
TOTAL				49	1	9	7	75	42	148	331
PERSENTASE				60,5%	100%	90%	100%	78,1%	93,3%	95,5%	83,8%
Liberalisme	L4.1	1.	<i>Information</i>	30	0	1	0	19	3	7	60
	L4.2	2.	<i>Civil Right</i>	2	0	0	0	2	0	0	4
	L4.3	3.	<i>Freedom</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				32	0	1	0	21	3	7	64
PERSENTASE				39,5%	0%	10%	0%	21,9%	6,7%	4,5%	16,2%

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Tingginya penggunaan kata dan frasa operasi dalam produk regulasi tersebut menunjukkan bahwa pandangan dari produk regulasi tentang narkoba di Filipina, melakukan operasi merupakan langkah yang tepat dalam mengatasi masalah narkoba yang sedang terjadi. Hal ini juga selaras dengan adanya kebijakan *war on drugs* yang telah dicanangkan oleh Presiden Duterte sejak tahun 2016 silam, yaitu dengan melegalkan membunuh pengguna dan penjual narkoba serta melaksanakan operasi TokHang dan HVT.

Data lain yang diperoleh dalam indikator tersebut adalah kata dan frasa informasi menempati urutan kedua sebagai jumlah penggunaan kata terbanyak dalam indikator tata kelola. *Sign words* pendekatan liberalisme tersebut memiliki tujuan untuk melancarkan apa yang telah direncanakan dalam produk regulasi tentang narkoba di Filipina, yaitu dengan mencari informasi terkait dengan pengguna, penjual, bahkan sindikat baik yang bersifat individu maupun kelompok.

Hal yang menarik pada indikator ini adalah kata "*freedom*" yang merupakan poin inti dari pendekatan liberalisme justru tidak tercantum dalam 7 dokumen produk regulasi tentang narkoba di Filipina. Justru kata "*civil right*" memiliki frekuensi penggunaan kata yang lebih tinggi dibandingkan dengan kata "*freedom*". Dimana kemudian dapat kita lihat bahwa pemerintah Filipina dalam mengatasi narkoba lebih mengutamakan hak masyarakat daripada memberikan kebebasan.

Duterte dalam pidatonya juga mengatakan "Perang ini akan menjadi tanpa henti dan kejam, jika Anda mau, seperti pada hari saat ini dimulai.", dimana yang dimaksud oleh Duterte adalah ia tidak akan memberikan toleransi terhadap para pengguna dan penjual narkoba dengan tujuan agar meminimalisir perkembangan dan peredaran narkoba di Filipina.

E. Analisa Terhadap Indikator Output

Dalam indikator ini, output didefinisikan sebagai mekanisme pendukung dalam rangka pemberlakuan undang-undang yang mengatur tentang narkoba di Filipina. Output pada indikator ini merupakan hasil luaran yang mengikat dalam menjawab dan memenuhi tuntutan mengatasi masalah narkoba yang sedang terjadi. Indikator ini diwakili dalam penggunaan sejumlah kata seperti keamanan, stabilitas, ketertiban, dan hukum pada pendekatan realisme. Kemudian terdapat kata perdamaian, kemerdekaan, dan keadilan pada pendekatan liberalisme.

Hasil analisa pada **Tabel 4.5** di bawah ini menunjukkan bahwa output yang terkandung dalam 7 dokumen produk regulasi tentang narkoba di Filipina juga menunjukkan cara pandang realisme dibandingkan dengan cara pandang liberalisme. Persentase output pendekatan realisme pada RA. 9165 sebesar 93.2%, RA. 10640 sebesar 75%, EO. No. 15 tahun 2017 sebesar 0%, EO No. 218 tahun 2003 sebesar 0%, CMC No. 16 tahun 2016 sebesar 100%, DDB Reg. No. 2 tahun 2007 sebesar 100%, dan DDB Reg. No. 1 tahun 2016 sebesar 100%, dengan total persentase kumulatif sebesar 95.8%.

Sedangkan persentase output pendekatan liberalisme pada RA. 9165 sebesar 6.8%, RA. 10640 sebesar 25%, EO. No. 15 tahun 2017 sebesar 0%, EO No. 218 tahun 2003 sebesar 0%, CMC No. 16 tahun 2016 sebesar 0%, DDB Reg. No. 2 tahun 2007 sebesar 0%, dan DDB Reg. No. 1 tahun 2016 sebesar 0%, dengan total persentase kumulatif sebesar 4.2%.

Pendekatan	Kode	No.	Output	Dokumen Undang-Undang dan Regulasi							
				R.A 9165	R.A 10640	E.O. No. 15 2017	E.O. No. 218 2003	CMC No. 16 2016	DDB Reg. No.2 2007	DDB Reg. No. 1 2016	Total Kata
Realisme	R5.1	1.	<i>Security</i>	1	0	0	0	1	0	1	3
	R5.2	2.	<i>Stability</i>	2	0	0	0	0	0	0	2
	R5.3	3.	<i>Discipline</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.	<i>Orderliness</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	R5.4	5.	<i>Law</i>	97	2	0	0	8	1	86	194
		6.	<i>Rule</i>	24	1	0	0	4	1	1	31
TOTAL				124	3	0	0	13	2	88	230
PERSENTASE				93,2%	75%	0%	0%	100%	100%	100%	95,8%
Liberalisme	L5.1	1.	<i>Peace</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	L5.2	2.	<i>Independence</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	L5.3	3.	<i>Justice</i>	9	1	0	0	0	0	0	10
	L5.4	4.	<i>Prosperity</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				9	1	0	0	0	0	0	10
PERSENTASE				6,8%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	4,2%

Tabel 4. 5 Hasil Pengukuran Indikator Output

Sumber: Diolah dari berbagai Sumber

Tingginya penggunaan frasa dan kata hukum menunjukkan bahwa penghormatan dan kepastian terhadap hukum di Filipina merupakan hal yang paling utama. Oleh karena itu dalam output yang terkandung dalam 7 dokumen produk regulasi tentang narkoba di Filipina, kata “*law*” memperoleh frekuensi paling banyak dalam penggunaan sejumlah kata. Selanjutnya kata yang memperoleh frekuensi paling banyak kedua dalam penggunaan sejumlah kata adalah kata “*rule*”, dimana kata “*rule*” itu sendiri merupakan *sensitive words* dari frasa dan kata hukum.

Hal tersebut membuktikan bahwa selain mengupayakan kondisi keamanan nasional, ketertiban, dan stabilitas, penghormatan dan kepastian hukum juga menjadi fokus utama pemerintah Filipina sebagai ujung tombak dalam mengatasi narkoba. Selain itu pemerintah Filipina juga memberikan hukum yang kuat dan tegas agar setiap masyarakat Filipina mendapatkan haknya untuk bebas dari narkoba.

Dari kelima hasil analisis indikator tersebut kemudian akan dijadikan satu menjadi tabel kumulatif untuk mempermudah dalam menyimpulkan hasil analisis dari dokumen produk regulasi tentang narkoba di Filipina.

Tabel 4. 6 Hasil Pengukuran Indikator Kumulatif

No.	Indikator	Pendekatan	
		Realisme	Liberalisme
1.	Aktor	56.8%	43.2%
2.	Otoritas	51.9%	48.1%
3.	Sumber Anggaran	60%	40%
4.	Tata Kelola	83.8%	16.2%
5.	Output	95.8%	4.2%
TOTAL		69.7%	30.3%

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa penggunaan kata dan frasa dari pendekatan realisme pada kelima indikator

yang telah ditentukan lebih tinggi daripada penggunaan kata dan frasa dari pendekatan liberalisme. Hal tersebut ditunjukkan pada indikator pendekatan realisme dengan total persentase sebesar 69.7%, sedangkan pada indikator pendekatan liberalisme dengan total persentase sebesar 30.3%. Maka dari hasil analisa yang telah diukur, dapat disimpulkan bahwa dokumen produk regulasi tersebut cenderung mengarah pada pendekatan realisme.